

EFFECT OF REGIONAL ORIGINAL INCOME ON GOVERNMENT EXPENDITURE IN MAKASSAR CITY

Jam'an

Universitas Muhammadiyah Makassar

andi.jam'an@unismuh.ac.id

Samsul Rizal

Universitas Muhammadiyah Makassar

samsulrizal@unismuh.ac.id

Nur Fadilah Arsyad

Universitas Muhammadiyah Makassar

nurfadilaharsyad@unismuh.ac.id

Abstrak

The main problem in this research is to know the description of the original regional income of the city of Makassar, to know the description of government expenditure in the city of Makassar, and to determine the effect of local revenue on government spending in the city of Makassar. This type of research is quantitative research. The research sampling technique was the last five years from 2015-2019. Data collection was carried out by documentation and literature study. The data collected in the study were analyzed using simple linear regression analysis techniques. Based on the results of data analysis, it can be seen that the data on local revenue and government expenditure have increased each year. The effect of local revenue on government spending is $0.296 > 0.05$. This means that local revenue has a positive but insignificant effect on government spending. The result of the determinant test (R^2) in research X_1 was 0.347 or 34.7%, while 65.3% was influenced by other factors. Based on these data, it can be concluded that there is no positive effect of local revenue on government spending in the city of Makassar.

Keywords: Local Own Revenue And Government Expenditure

Abstrak

Masalah utama dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui gambaran pendapatan asli daerah kota Makassar, untuk mengetahui gambaran pengeluaran pemerintah di kota Makassar, dan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pengeluaran pemerintah di kota Makassar. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Teknik pengambilan sampel penelitian yaitu lima tahun terakhir dari tahun 2015-2019. Pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi dan studi literatur. Data yang terkumpul dalam penelitian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis regresi linear sederhana. Berdasarkan hasil analisis data, terlihat bahwa data pada pendapatan asli daerah dan pengeluaran pemerintah tiap tahun mengalami peningkatan. Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pengeluaran pemerintah sebesar $0.296 > 0.05$. Hal ini berarti Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap pengeluaran pemerintah tetapi tidak signifikan. Hasil uji determinan (R^2) pada penelitian X_1 sebesar 0.347 atau sebesar 34,7% sedangkan 65,3% dipengaruhi oleh faktor lain. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh positif pendapatan asli daerah terhadap pengeluaran pemerintah di kota Makassar.

Kata Kunci :Pendapatan Asli Daerah Dan Pengeluaran Pemerintah

1. PENDAHULUAN

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu komponen kebijaksanaan fiskal yang terutama bertujuan untuk mencapai kestabilan ekonomi yang mantap dengan tetap mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi. Jika dilihat dari perkembangan kegiatan pemerintah dari tahun ke tahun, terlihat bahwa peranan pemerintah selalu meningkat hampir di segala bidang ekonomi. Pengeluaran pemerintah berdasarkan pada permendagri No 13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah, belanja daerah di kelompokkan ke dalam belanja langsung dan belanja tidak langsung. Secara umum peningkatan belanja pemerintah lebih didominasi untuk fungsi pelayanan umum.

Berdasarkan klasifikasi belanja negara menurut fungsi, belanja negara dibedakan menjadi belanja untuk fungsi pelayanan umum, dan fungsi ekonomi. Anggaran fungsi pelayanan umum tersebut antara lain mencakup: program-program pelayanan umum yang dilakukan oleh kementerian negara/lembaga, pemberian berbagai jenis subsidi, pembayaran bunga utang, program penataan administrasi kependudukan, program pemberdayaan masyarakat, pembangunan daerah, serta program penelitian dan pengembangan iptek.

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak

serta mengembangkan jaminan sosial dengan mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolak ukur kinerja dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

UU Nomor 33 Tahun 2004 pasal 10 menyatakan bahwa yang menjadi sumber sumber pembiayaan untuk pembangunan daerah (capital investment) antar lain berasal dari PAD dan dana perimbangan yang diterima oleh daerah-daerah dari pemerintah pusat. Dan perimbangan itu sendiri terdiri dari Dana Bagi Hasil, Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Selain itu juga terdapat sumber lain yang berasal dari pembiayaan berupa pinjaman daerah. Oleh sebab itu, tuntunan untuk mengubah struktur belanja menjadi semakin kuat, khususnya bagi daerah-daerah yang mengalami kapasitas fiskal daerah (Halim, 2001:63).

Daerah-daerah yang kapasitas fiskalnya rendah cenderung mengalami tekanan fiskal yang kuat. Rendahnya kapasitas ini mengindikasikan tingkat kemandirian daerah yang rendah. Daerah dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya memberikan porsi belanja daerah yang sangat lebih besar untuk sektor-sektor produktif. Pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan Pemerintah Daerah (pemda) setempat dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik.

Pergeseran ini ditujukan untuk peningkatan investasi modal. Semakin tinggi investasi modal diharapkan mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD. Pemerintah

perlu memfasilitasi berbagai aktivitas peningkatan perekonomian, salah satunya dengan membuka kesempatan berinvestasi. Pembangunan infrastruktur dan pemberian berbagai fasilitas kemudahan dilakukan untuk meningkatkan daya tarik investasi. Otonomi daerah merupakan realisasi dari ide desentralisasi. Menurut Sidik (2002:46), konsep desentralisasi terdiri dari desentralisasi politik (*political decentralization*), dan desentralisasi administrative (*administrative decentralization*), dan desentralisasi fiskal (*fiscal decentralization*). Melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menggali pendapatan dan melakukan peran alokasi secara mandiri dalam menetapkan prioritas pembangunan.

Adanya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal akan lebih pemeratakan pembangunan sesuai dengan keinginan daerah dalam mengembangkan potensi masing-masing. Menurut Saragih (2003:74), otonomi daerah dan desentralisasi fiskal akan memberikan manfaat yang optimal jika diikuti oleh kemampuan finansial yang memadai oleh daerah otonom. Menurut Susanti (2008:85), dengan adanya desentralisasi fiskal, daerah dituntut untuk meningkatkan kemampuan ekonomi daerahnya sehingga mampu bersaing dengan daerah lain melalui penghimpunan modal untuk kebutuhan investasi dan atau kemampuan berinteraksi dengan kemampuan lain.

Menurut Basri dan Subri (2003), pengeluaran pemerintah itu sangat bervariasi, namun secara garis besarnya dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Pengeluaran yang merupakan investasi yang menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi dimasa yang akan datang.
2. Pengeluaran yang langsung memberikan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.
3. Pengeluaran yang merupakan penghematan terhadap masa yang akan datang. Pengeluaran untuk menyediakan kesempatan kerja yang lebih luas dan menyebarkan daya beli yang luas.

Hubungan Pendapatan asli daerah dan pengeluaran pemerintah adalah sebagai sumber-sumber yang diperoleh dan dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah. Warsito, dkk (2008) mengatakan bahwa belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintah Daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Provinsi atau Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Dalam rangka memudahkan penilaian kewajaran biaya suatu program atau kegiatan, belanja menurut

kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Menurut Halim (2009) belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Walaupun secara keseluruhan pengeluaran pemerintah sangat penting dalam sumbangannya terhadap pendapatan nasional, tetapi yang lebih penting lagi adalah penentuan komposisi dari pengeluaran pemerintah tersebut. Komposisi dari pengeluaran pemerintah merupakan strategi untuk mencapai sasaran dari pembangunan nasional.

Belanja negara juga dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis belanjanya. Berdasarkan jenis belanja tersebut, perkembangan belanja pemerintah pusat masih didominasi oleh pengeluaran yang sifatnya wajib (*non discretionary expenditure*) daripada pengeluaran yang bersifat tidak mengikat. Pengeluaran yang sifatnya wajib meliputi: belanja pegawai, pembayaran bunga utang, subsidi, dan sebagian belanja barang. Pengeluaran yang tidak mengikat seperti: belanja modal, bantuan sosial, sebagian belanja barang dan belanja lain-lain.

Secara umum realisasi pengeluaran pemerintah atau belanja daerah pada kurun waktu 2015-2018 mengalami peningkatan setiap tahunnya, yaitu dari 247,04 triliun rupiah pada

tahun 2015 menjadi 264,10 triliun rupiah tahun 2016 dan 307,04 triliun rupiah pada tahun 2017. Pada tahun 2018 belanja daerah lingkungan dianggarkan sebesar 349,96 triliun rupiah atau mengalami kenaikan sebesar 13,98 persen dibanding tahun 2017. Peningkatan ini di sebabkan oleh kenaikan pada hampir seluruh jenis belanja, baik pada bagian belanja tidak langsung maupun pada bagian belanja langsung.

Pendapatan pemerintah provinsi di seluruh Indonesia dari tahun 2015-2018 terus mengalami peningkatan, dengan total pendapatan 242,71 triliun pada tahun 2015, 275,57 triliun rupiah pada tahun 2016, dan 323,49 triliun rupiah pada tahun 2017 atau mengalami pertumbuhan sebesar 13,54 persen pada tahun 2016 dan 17,39 persen pada tahun 2017. Pada tahun 2018 pendapatan pemerintah provinsi ditargetkan naik 2,49 persen menjadi 331,56 triliun rupiah. Peningkatan pertumbuhan yang cukup signifikan di tahun 2018, lebih di sebabkan oleh meningkatnya pendapatan dari dana perimbangan khususnya komponen bagi hasil pajak yang naik sebesar 13,37 persen dibanding tahun 2017. Selain itu, peningkatan pendapatan juga didukung oleh meningkatnya target pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya komponen hasil perusahaan milik daerah yang di pisahkan yang naik sebesar 15,92 persen di bandingkan tahun 2017 dan provinsi yang memiliki pertumbuhan pendapatan tertinggi pada tahun 2018 yaitu Maluku yaitu sebesar 22,96 persen dibanding tahun 2017.

Hal ini menjadi dasar peneliti untuk mengambil kota Makassar untuk mengambil secara langsung data peningkatan dan realisasi penggunaan

anggaran daerah dan membawa implikasi mendasar terhadap keberadaan tugas, fungsi dan tanggungjawab pelaksanaan otonomi daerah yang antara lain dibidang ekonomi antara daerah serta pencarian sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan dengan cara menggali potensi yang dimiliki daerah. Oleh sebab itu, pembangunan ekonomi daerah sangat ditentukan oleh kebijakan daerah itu sendiri dalam menentukan sektor-sektor yang diprioritaskan untuk pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

Berdasarkan UU No. 22 tahun 1999 yang kemudian diganti dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk mengatur dan mengelola berbagai urusan penyelenggaraan pemerintah bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah yang bersangkutan sedangkan, dalam hal pembiayaan dan keuangan daerah di atur dalam UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah tidak hanya kesiapan aparat pemerintah saja, tetapi juga masyarakat untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah dengan pemanfaatan sumber-sumber daya secara optimal.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti memandang perlu melakukan penelitian yang berjudul "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pengeluaran Pemerintah di Kota Makassar".

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Pendapatan Asli daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang berasal dari sumber-sumber pendapatan daerah yang terdiri

dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dari dinas-dinas, dan penerimaan lain-lain. Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2004). Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

Penerimaan pemerintah daerah sesuai dengan undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (Samu,2005) di artikan sebagai uang yang masuk ke kas daerah, atau penerimaan yang didapat pemerintah daerah meliputi pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah bersumber dari PAD, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Sedangkan pembiayaan bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah, penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan daerah dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Secara garis besar sumber-sumber penerimaan atau cara-cara yang ditempuh oleh pemerintah untuk mendapatkan dana pada dasarnya dapat digolongkan antara lain sebagai berikut:

- a. Pajak, adalah pembayaran iuran oleh rakyat kepada pemerintah yang dapat dipisahkan dengan tanpa balas jasa secara langsung dapat ditunjuk.
- b. Retribusi adalah suatu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah dimana kita dapat melihat adanya hubungan antara balas jasa yang

langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut.

- c. Keuntungan dari perusahaan-perusahaan Negara. Penerimaan dari sumber ini merupakan penerimaan pemerintah dari hasil penjualan barang-barang yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan Negara.
- d. Pinjaman. Pinjaman ini bisa dapat berasal dari luar Negeri maupun dari dalam Negeri.

2.2 Teori Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah merupakan alokasi anggaran yang disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya ke berbagai sektor atau bidang dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat melalui bermacam-macam program. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pengeluaran pemerintah Indonesia secara garis besar di kelompokkan ke dalam dua golongan sebagai berikut:

a. Pengeluaran Rutin

Pengeluaran rutin adalah pengeluaran yang secara rutin setiap tahunnya dilakukan oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan dan pemeliharaan roda pemerintahan, yang terdiri dari belanja pegawai yaitu pembayaran gaji pegawai termasuk gaji pokok dan tunjangan, belanja barang, yaitu untuk pembelian barang-barang yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah sehari-hari, subsidi, pembayaran angsuran dan bunga utang negara, belanja pemeliharaan yaitu pengeluaran untuk memelihara agar milik atau kekayaan pemerintah tetap terpelihara secara baik dan belanja perjalanan yaitu untuk perjalanan kepentingan penyelenggaraan pemerintahan.

b. Pengeluaran Pembangunan

Pengeluaran pembangunan merupakan pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk pembangunan fisik dan non fisik dalam rangka menambah modal masyarakat. Contoh pembangunan fisik adalah pembangunan jalan, jembatan, sekolah dan rumah sakit. Sedangkan pembangunan non fisik seperti pelaksanaan program pengentasan kemiskinan. Pengeluaran pemerintah adalah hal yang sangat penting karena menyangkut output yang dihasilkan untuk kepentingan hajat hidup orang banyak. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

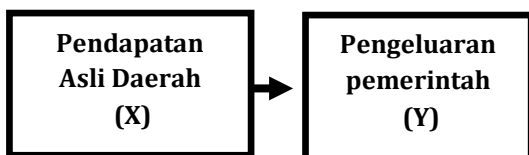
Pengeluaran yang dilakukan pemerintah menunjukkan perannya dalam perekonomian dalam rangka mencapai kondisi masyarakat yang sejahtera. Menurut Dumairy pemerintah memiliki 4 peran yaitu:

- 1) Peran alokasi, yakni peranan pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi yang ada agar pemanfaatannya bisa optimal dan mendukung efisiensi produksi.
- 2) Peran distributif, yakni peranan pemerintah dalam mendistribusikan sumber daya. Kesempatan dan hasil-hasil ekonomi secara adil dan wajar.
- 3) Peran stabilitatif, yakni peranan pemerintah dalam memelihara stabilitas perekonomian dan memulihkannya jika berada dalam keadaan *equilibrium*.
- 4) Peran distimatif, yakni peranan pemerintah dalam menggerakkan proses pembangunan ekonomi agar lebih cepat tumbuh, berkembang dan maju.

a. Pengeluaran Pemerintah Secara Mikro Dan Makro

2.3 Kerangka Konsep

Berdasarkan landasan teori dan kajian terhadap penelitian terdahulu, maka disusun suatu kerangka pemikiran teori mengenai penelitian yang akan dilakukan. Pengeluaran pemerintah merupakan alokasi anggaran yang disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya ke berbagai sektor atau bidang dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat melalui bermacam-macam program. Kenaikan atau penurunan pengeluaran pemerintah akan menaikkan atau menurunkan pendapatan nasional. Hal ini tentu akan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah yang akan diambil. Kerangka pemikiran teori tersebut adalah sebagai berikut :



Gambar 2.2 Kerangka Pikir

2.4 Hipotesis

Berdasarkan uraian permasalahan, teori, konsep, serta kerangka pemikiran tersebut, maka hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah :apakah ada pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pengeluaran pemerintah di kota Makassar.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Teknik Analisis Data

Untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pengeluaran pemerintah di kota

Makassar, digunakan metode uji asumsi klasik. Metode ini bertujuan untuk menguji hipotesis tentang adanya hubungan sebab akibat antara berbagai variable yang diteliti berdasarkan data-data yang diperoleh guna mendapatkan makna dan implikasi permasalahan yang ingin dipecahkan secara sistematis, dan akurat. Metode analisis data panel dengan program *software Microsoft Excel* dan *E-views*.

a. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah persyaratan variable yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda yang berbasis *Ordinary Least Square* (OLS). Uji asumsi klasik terbagi menjadi empat yaitu:

1) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variable terikat dan variable bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak dengan menggunakan metode analisis grafik. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk mendeteksi apakah residualnya berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan membandingkan nilai *Jarque Bera* (JB) dengan nilai X^2 tabel dengan ketentuan jika nilai $JB > X^2$ tabel maka residualnya berdistribusi tidak normal sebaliknya jika nilai $JB < X^2$ tabel maka residualnya berdistribusi normal.

2) Uji Multikolinearitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variable independent. Model yang baik seharusnya tidak terjadi kolrelasi antara

yang tinggi diantara variable bebas. Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas dapat dilihat dengan hasil estimasi antar variable independendengan membandingkan nilai *Adjusted R-Square*-nya masing-masing variable independen.

3) Uji Heterokedastisitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi terjadi ketidaksamaan variansi dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya heterokedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis grafik atau melihat *Scatter Plot* antara nilai prediksi variable dependen dengan residual.

4) Uji Autokorelasi

Autokorelasi dapat diartikan sebagai korelasi yang terjadi di antara anggota anggota dari serangkaian observasi yang dilakukan. Adapun model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Dan salah satu uji yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya penyimpangan asumsi klasik ini adalah uji *Durbin Watson* (D-W test).

b. Uji Hipotesis

1) Uji parsial (t)

Uji parsial digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variable bebas secara individual dalam menjelaskan variable terikat. Uji ini dilakukan dengan melihat probabilitas t hitung, ketika $prob < \text{taraf signifikansi } 5\%$, maka dapat disimpulkan variable

bebas tersebut signifikan mempengaruhi variable terikat.

2) Uji simultan (F)

Uji F digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh dari seluruh variable bebas secara bersama-sama terhadap variable terikat. Apabila nilai $prob F < \text{taraf signifikansi } 5\%$ maka dapat disimpulkan bahwa variable bebas secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variable terikat.

3) Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (*goodness of fit*) digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variable terikat. Nilai dari R² berada pada rentang 0-1. Semakin tinggi angka tersebut maka semakin baik model yang dibuat dan sebaliknya

4) Analisis Regresi Linear Sederhana

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linear sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap perubahan struktur ekonomi. Adapun persamaan regresi linear sederhana sebagai berikut:

$$Y = \alpha + bX + e$$

Dimana :

Y = Pengeluaran Pemerintah

X = Pendapatan Asli daerah

α = Konstan

b = Koefisien Regresi

e = Faktor Error

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Penyajian Data

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh pengeluaran ekonomi

pemerintah terhadap struktur perubahan ekonomi. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data Time Series mulai dari tahun 2015-2019 dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 25.

a. Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang berasal dari sumber-sumber pendapatan daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dari dinas-dinas, dan penerimaan lain-lain.

Tabel 4.1
Pendapatan Asli Daerah tahun 2015-2019

Tahun	PAD (Milyar rupiah)
2015	828.871.892.852,66
2016	971.859.753.605,76
2017	1.337.231.047.257,10
2018	1.185.453.010.989,65
2019	1.297.485.382.003,03

Sumber: Data primer, BPS Makassar

Pada tabel 4.1 perkembangan PAD Kota Makassar di tahun 2015 Rp.828.871.892.852,66 mengalami kenaikan hingga tahun 2017 Rp.1.337.231.047.257,10 mengalami penurunan pada tahun 2018 Rp.1.185.453.010.989,65 dan mengalami kenaikan pada tahun 2019 menjadi Rp. 1.297.485.382.003,03. Secara keseluruhan total PAD tahun 2015-2019 sebesar Rp. 5.620.901.086.708,20 miliar rupiah.

b. Pengeluaran Pemerintah Kota Makassar

Pengeluaran Pemerintah Kota Makassar adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di Makassar. Pengeluaran Pemerintah Kota Makassar dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. Pengeluaran Pemerintah Kota Makassar sering digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah negara semakin besar pendapatan perkapitanya, semakin

makmur negara tersebut (Wikipedia:2012).

Dalam pembahasan ini akan dilihat tingkat Pengeluaran Pemerintah Kota Makassar dari tahun 2015-2019 di Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar, gambaran secara umum dapat dilihat dari table berikut :

Tabel 4.2
Realisasi Pengeluaran Rutin dan Pengeluaran Pembangunan di
Kota Makassar Periode 2015-2019

Tahun	Pengeluaran Rutin	Pengeluaran Pembangunan	Total Pengeluaran Pemerintah
2015	134.968,00	43.488,76	178.456,76
2016	163.364,85	87.780,47	251.145,32
2017	260.541,19	91.014,90	351.556,09
2018	235.530,21	125.797,80	361.328,01
2019	343.505,62	868.007,04	1.211.512,66

Sumber: data primer, BPS Makassar

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Tampak dari tahun 2015-2019 terjadi peningkatan pesat pada tahun 2019.

c. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas

keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Uji normalitas data dapat dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov Smirnov satu arah. Pengambilan kesimpulan untuk menentukan apakah suatu data mengikuti distribusi normal atau tidak adalah dengan menilai nilai signifikannya. Jika signifikan > 0,5 maka variabel berdistribusi normal dan sebaliknya jika signifikan < 0,5 maka variabel tidak berdistribusi normal Ghazali (2005).

Tabel 4.3 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		5
Normal Parameters ^b	Mean	.0000000
	Std. Deviation	339991.18260000
Most Extreme Differences	Absolute	.248
	Positive	.248
	Negative	-.145
Test Statistic		.248
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

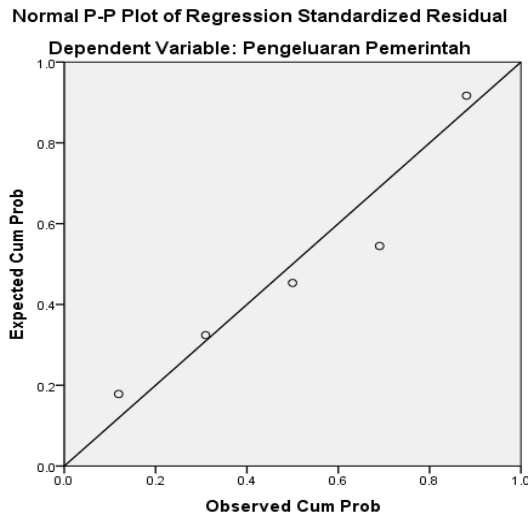
Sumber: SPSS versi 25 (data diolah 2020)

Tabel di atas menunjukkan bahwa data hasil pendapatan asli daerah dan pengeluaran pemerintah berdistribusi normal. Hasil data menunjukkan nilai

signifikan adalah 0,200 atau dapat disajikan pada $0,200 > 0,05$. Berdasarkan hasil uji normalitas

tersebut diperoleh nilai “*P-Value (Sig)*” > 0,05.

Gambar 4.1 Grafik normalitas



Sumber: SPSS versi 25 (data diolah 2020)

Berdasarkan pada gambar 4.1 diatas terlihat bahwa tersebar secara diagonal mengikuti garis histogram.Maka pengambilan keputusan, jika data tersebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti grafik histogram maka plot distribusi normal.

2) Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah situasi adanya korelasi variabel-variabel independen di antara satu dengan lainnya.Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen.Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen.(Kuncoro 2013).

Tabel 4.4 Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Pendapatan Asli Daerah	1.000	1.000

a. Dependent Variable: Pengeluaran Pemerintah

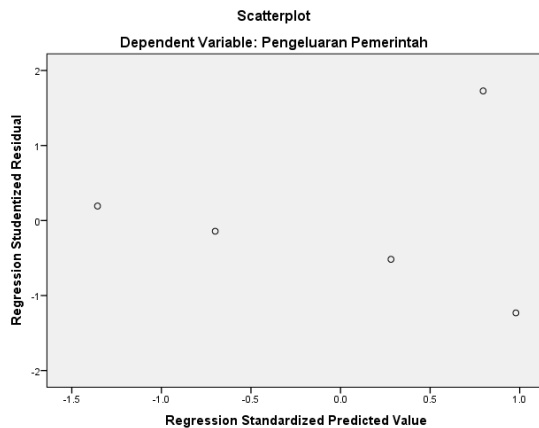
Sumber: SPSS versi 25 (data diolah 2020)

Berdasarkan pada tabel 4.4 uji multikolinieritas menunjukkan nilai VIF sebesar 1,000 yang artinya nilai VIF < 10 dan nilai toleransi 1,000 yang artinya diantara 0 dengan 1 sehingga dapat dikatakan tidak ada multikolinieritas.Pada variabel lingkungan kerja nilai VIF sebesar (1,000) yang artinya nilai VIF < 10 dan nilai toleransi (1,000) yang artinya diantara 0 dengan 1 sehingga dapat dikatakan tidak ada multikolinieritas.

3) Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas terjadi apabila residual dan nilai prediksi memiliki korelasi atau pola hubungan.Pola hubungan ini tidak hanya sebatas hubungan yang linier, tetapi dalam pola yang berbeda juga dimungkinkan.Oleh karena itu ada beberapa metode uji heteroskedastisitas salah satunya adalah metode Glejser.

Gambar 4.2 Uji Heterokedastisitas



Sumber: SPSS versi 25 (data diolah 2020)

Berdasarkan pada gambar 4.2 hasil scatterplot diatas terlihat secara acak dan menyebar, berarti tidak terjadi heterokedastisitas.

4) Uji Autokorelasi

Tabel 4.5 Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.589 ^a	.347	.130	392588.00160	1.435
a. Predictors: (Constant), Pendapatan Asli Daerah					
b. Dependent Variable: Pengeluaran Pemerintah					

Sumber: SPSS versi 25 (data diolah 2020)

Berdasarkan hasil uji autokorelasi pada tabel diatas, menyatakan bahwa nilai Dubin-Watson 1.435 berada diantara -2 dan 2 yang menyatakan bawa tidak ada terjadi gejala autokorelasi.

d. Uji Hipotesis

Adapun pengujian terhadap hipotesis yang diajukan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1) Uji T (Individu)

Uji t dilakukan untuk menguji koefisien regresi secara parsial dari variabel independennya. Tingkat signifikansi yang digunakan sebesar 5%, dengan derajat kebebasan $df = (n-k-1)$,

Uji autokorelasi adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel pengganggu padaperiode tertentu dengan variabel sebelumnya. Untuk data time series autokorelasi sering terjadi, namun untuk data crossetion hal ini jarang terjadi karena variabel pengganggu satu berbeda dengan yang lain. Untuk mendeteksi adanya autokorelasi dapat dilakukan dengan nilai Durbin Watson, dengan beberapa kriteria :

- Angka DW di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif
- Angka DW di antara -2 dan 2 berarti tidak ada autokorelasi
- Angka DW diatas 2 bererti ada autokorelasi negative

dimana (n) adalah jumlah observasi dan (k) adalah jumlah variabel. Uji ini dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel dengan ketentuan sebagai berikut:

- H0 diterima jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ untuk $\alpha = 5\%$
- H1 diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ untuk $\alpha = 5\%$

Tabel 4.6 Uji Parsial (uji T)

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error				Tolerance	VIF
1	(Constant)	-810261.555	1028694.648		-.788	.488		
	Pendapatan Asli Daerah	1.140	.902	.589	1.264	.296	1.000	1.000

a. Dependent Variable: Pengeluaran Pemerintah

Sumber: SPSS versi 25 (data diolah 2020)

Berdasarkan tabel 4.6 hasil analisis regresi linear sederhana pada tabel diatas, dapat dijelaskan melalui rumus sebagai berikut:

$$Y = a + bX + e$$

$$Y = -810261.555 + 1,140X$$

Hasil pada tabel dan rumusan masalah regresi diatas, maka dapat diartikan sebagai berikut:

- Hal Ini menunjukkan bahwa apabila pendapatan asli daerah constan, maka pengeluaran pemerintah sebesar - 810261.555
- Hal ini menunjukkan bahwa apabila pendapatan asli daerah ditingkatkan maka akan naik sebesar 1,140

Berdasarkan tabel output diatas diketahui t hitung variable adalah 1.264 kemudian nilai pada tabel distribusi 5% (0.05) yakni sebesar 2,571. Maka nilai $t_{hitung} \geq t_{Tabel}$ ($1.264 < 2,571$), yang artinya H_1 ditolak dan H_0 diterima. Hal ini

diperkuat dengan nilai signifikan (0.296 > 0.05).maka dapat diartikan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap pengeluaran pemerintah bila dilakukan uji secara parsial.

2) Koefisien Determinan (R²)

R² digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan variabel bebas dengan variabel terikat. Nilai R² terletak antara 0 sampai dengan 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Tujuan menghitung koefisien determinansi adalah untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Bila R² mendekati 1 (100%), maka hasil perhitungan menunjukkan bahwa makin tepat garis regresi yang diperoleh. Sebaliknya jika nilai R² mendekati 0 maka menunjukkan semakin tidak tepat garis regresi untuk mengukur data observasi.

Tabel 4.7 Koefisien Determinan (R²)

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.589 ^a	.347	.130	392588.00160	1.435

a. Predictors: (Constant), Pendapatan Asli Daerah
 b. Dependent Variable: Pengeluaran Pemerintah

Sumber: SPSS versi 25 (data diolah 2020)

Dengan melihat pada tabel 5.17 diatas dapat disimpulkan bahwa koefisien determinan (R^2) pada penelitian ini sebesar 0.347, sehingga dapat dijelaskan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (X_1) dalam penelitian ini sebesar 34,7% sedangkan 65,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang di luar model penelitian ini yang mempengaruhi pengeluaran pemerintah misalkan berasal dari sektor bidang lain.

4.2 Pembahasan

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar di tahun 2015 mengalami kenaikan hingga tahun 2017, mengalami penurunan pada tahun 2018 dan mengalami kenaikan pada tahun 2019. Secara keseluruhan total PAD tahun 2015-2019 sebesar Rp. 5.620.901.086.708,20 miliar rupiah. Pengeluaran pemerintah terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Tampak dari tahun 2015-2019 terjadi peningkatan pesat pada tahun 2019.

Fakta yang mendukung penelitian ini dari Pendapatan Asli Daerah terhadap Pengeluaran pemerintah di Kota Makassar antara lain: (1) Pengeluaran pemerintah daerah kota Makassar berdasarkan realisasi pengeluaran pembangunan sejak tahun 2015 sampai tahun 2019 terus mengalami peningkatan. Hal ini memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan industri dan jasa melalui: bantuan modal, alat dan mesin, pelatihan peningkatan kualitas produk bagi UKM, serta pengembangan pasar tradisional untuk para pedagang kecil; dan (2) Kondisi infrastruktur jalan di kota Makassar yang semakin membaik selama periode tahun 2015-2019.

Infrasuktur jalan di kota Makassar khususnya jalan dengan kondisi rusak berat yang semula sepanjang 1.719 km kemudian terus mengalami penurunan menjadi 1.262 km. Perbaikan kualitas infrastruktur jalan ini dapat mempermudah akses pemasaran barang dan jasa sehingga semakin mendorong pertumbuhan sektor industri dan jasa antar wilayah kabupaten/kota. Pendapatan asli daerah kota Makassar diperoleh dari pajak masyarakat, anggaran daerah dan hasil usaha masyarakat. Anggaran Pengeluaran Pemerintah Kota Makassar pada perikanan dan perindustrian 2 hal ini menjadi focus utama pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat Kota Makassar sebagai kota besar di Indonesia. Untuk urusan pilihan bidang pertanian telah dialokasikan program peningkatan produksi pertanian serta program pemberdayaan penyuluh pertanian.

Dari anggaran Pengeluaran Pemerintah yang dialokasikan untuk sektor pertanian pada saat ini memang sudah cukup menyentuh masyarakat dan memiliki peran bagi pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi masih terdapat beberapa permasalahan mendasar yang harus dipecahkan untuk tetap dapat menunjang serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi tersebut. Permasalahan tersebut antara lain Kelembagaan dan kemitraan usaha petani belum sesuai dengan sasaran usaha pengembangan agribisnis secara utuh. Di samping itu wawasan dan kemampuan petani/kelompok tani masih rendah, dengan demikian maka nilai tambah yang diterima petani belum maksimal.

Oleh karena itu perlu dilakukan pembinaan dan pelatihan secara intensif kepada petani agar mereka membentuk dan mengembangkan kelompoknya serta mampu bermitra dalam usaha agribisnis. Dengan memperhatikan permasalahan di atas dengan pengalokasian anggaran Pengeluaran Pemerintah Sektor pertanian yang cukup maka permasalahan-permasalahan tersebut dapat diatasi sehingga secara langsung akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Pada industri rumah tangga ataupun industri pada level kecil dan menengah yang masih membutuhkan bantuan pemerintah khususnya masalah pendanaan untuk investasi tersebut. Selain masalah pendanaan untuk meningkatkan modal usaha, masih terdapat banyak kekurangan yang dimiliki seperti minimnya kemampuan sumber daya manusia yang masih mengandalkan pola-pola tradisional dalam melaksanakan aktivitas mereka. Langkah yang bisa diambil oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui sektor perindustrian dan perdagangan adalah dengan meningkatkan anggaran belanja yang dialokasikan untuk pengembangan usaha kecil menengah misalnya pemberian bantuan sarana dan peralatan industri yang representatif yang dapat membantu usaha mereka.

Selain itu pendidikan dan pelatihan serta *workshop* bagi *stakeholder* di bidang perindustrian dan perdagangan sehingga mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada. Pengembangan sektor industri di Kabupaten Maluku Tengah sebaiknya diarahkan pada industri yang memiliki daya saing tinggi dan bertumpu pada SDM yang kuat. Dalam jangka panjang anggaran

pemerintah sebaiknya dialokasikan untuk pembangunan industri yang sehat, meningkatkan kapasitas industri secara optimum. Dengan demikian jika hal tersebut dapat dijalankan maka sektor perindustrian dan perdagangan dapat menjadi sektor unggulan yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Penelitian yang dilakukan pada pendapatan asli daerah mengalami peningkatan dalam waktu 5 tahun karena semakin meningkatnya penduduk yang ada di Kota Makassar dan juga semakin meningkatnya aktivitas produksi maupun pengguna kendaraan sehingga hasil pajak masyarakat meningkat dan ditambah dari anggaran daerah dari pemerintah yang semakin meningkat dalam program pengembangan kota. Hal ini tidak hanya berpengaruh pada pengeluaran pemerintah saja tetapi juga berpengaruh pada pengeluaran sector lainnya yang mendukung dalam perkembangan kota Makassar. Pemerintah Daerah Kota Makassar sebaiknya meningkatkan sumber pendapatan asli daerah sehingga dapat meningkatkan penerimaan daerah yang akan berimplikasi pada meningkatnya APBD.

5. PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar di tahun 2015 mengalami kenaikan hingga tahun 2017, mengalami penurunan pada tahun 2018 dan mengalami kenaikan pada tahun 2019.
2. Pengeluaran pemerintah terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dari tahun 2015-2019

dan mengalami peningkatan tiap tahun.

3. Secara parsial, pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pengeluaran pemerintah sebesar $0.296 > 0.05$. Hal ini berarti Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap pengeluaran pemerintah tetapi tidak signifikan. Hasil uji determinan (R^2) pada penelitian X1 sebesar 0.347 atau sebesar 34,7% sedangkan 65,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang di luar model penelitian ini yang mempengaruhi pengeluaran pemerintah misalkan berasal dari sektor bidang lain.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian ini, maka penulis menyarankan hal-hal yang perlu diperhatikan pada pendapatan asli daerah (PAD). PAD merupakan sumber dana keuangan yang harus digali secara optimal untuk menunjang pembangunan suatu daerah. Adapun beberapa usulan yang dituukan untuk pemerintah meningkatkan PAD, diantaranya:

1. Meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat dan bantuan pengadaan bisnis untuk perkembangan ekonomi dan SDM.
2. Meningkatkan efisiensi pelayanan public.
3. Kendalikan KKN dalam system pemungutan pajak dan retribusi.
4. Meningkatkan jaminan keadilan bagi waib pajak/retribusi.

DAFTAR PUSTAKA .

- Abdul Halim. 2002. *Akuntansi Sektor Publik akuntansi Keuangan Daerah Edisi Pertama Salemba empat, Jakarta.*
- Al Muchtar, S. (2015). *Dasar Penelitian Kualitatif. Bandung: Gelar Pustaka Mandiri.*

Alisjahbana, Armida S. 2000. *Manajemen Otonomi Daerah: Implementasi Desentralisasi dan Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional "Solusi dan Evaluasi Kritis Masa Depan Ekonomi Indonesia" diselenggarakan Jurusan Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Pasundan, Bandung.*

Arsyad, Lincolin, 1999, *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi*

Arsyad, Lincolin. 2010. *Ekonomi Pembangunan. STIE YKPN. Yogyakarta. Daerah, Yogyakarta: BPFE.*

Jhingan, M.L.2014. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Rajawali Pers: Jakarta.*

Kuncoro, Mudrajad 1997, *Ekonomi Pembangunan, Teori, masalah dan kebijakan, Cetakan pertama, Unit penerbitan dan percetakan akademi manajemen perusahaan YKPN, Yogyakarta.*

Mamesah, D, J. 1995. *Sistem Administrasi Keuangan Daerah. Jakarta: Pustaka Utama*

Mardiasmo. 2000. *Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah: Implementasi Value for Money Audit sebagai Antisipasi Terhadap Tuntutan Akuntabilitas Publik. J. Akuntansi Auditing Indononesia (JAAI), Vol. IV(1), UII Yogyakarta.*

Merang Kahang, Muhammad Saleh, dan Rahcmad Budi Suhartono. *Pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten kutai timur. Jurnal ekonomi, manajemen, dan akuntansi Vol 18 (2) 2016 ISSN print: 1411-1713 ISSN online: 2528-150x*

- Muhammad Nur Afiat. *Analisis pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap perubahan struktur ekonomi di provinsi sulawesi tenggara. Jurnal ekonomi pembangunan Fe-unhalu Vol XVI 8. Desember 2015.*
- Nur Baeti. *Pengaruh pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan pengeluaran pemerintah terhadap pembangunan manusia kabupaten/kota di provinsi jawa tengah tahun 2007-2011. Jurnal ekonomi pembangunan Vol 2 No 3 2013.*
- Ristiyanti Ahmadul Marunta. *Pengaruh belanja daerah dan pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota provinsi sulawesi selatan periode 2007-2016. Skripsi ekonomi 2017.*
- Ryan Ezkirianto, Muhammad Findi A. *Analisis keterkaitan antara indeks pembangunan manusia dan PDRB perkapita di indonesia. Jurnal ekonomi dan kebijakan pembangunan Vol 2 no.1 2013.*
- Sukirno, Sadono. 2006. *Makroekonomi: Teori Pengantar (edisi ke tiga). Jakarta: Rajawali Press.*
- Sukirno, 2006, *Ekonomi pembangunan: proses, masalah, dan dasar kebijakan kencana (Predana Media).*
- Suparmoko. 2000. *Ekonomika Lingkungan. Edisi pertama, Yogyakarta : BPFE.*
- Tampubolon, M Saur. 2014. *Penelitian Tindakan Kelas Sebagai Pengembangan Profesi Pendidik dan keilmuan. Jakarta: Erlangga.*
- Todaro, Michael.P. 1994. *Ekonomi untuk negara berkembang. Edisi ketiga, Jakarta : BUMI AKSARA*
- Todaro, Michael. P. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Edisi Ketujuh, Terjemahan Haris Munandar. Jakarta : Penerbit Erlangga.*
- Todaro, Michael. P. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Edisi Ketujuh, Terjemahan Haris Munandar. Jakarta : Penerbit Erlangga.*
- Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Pasal 1 Ayat 14, *Belanja Daerah.*
- Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 Berdasarkan pasal 64 ayat 2 *tentang pokok-pokok pemerintahan daerah.*
- UU No. 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah*
-